

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Jonaedi, 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar.
- Hr, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, 2008, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press, Jakarta.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sururama, Rahmawati, Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Cendekia Press, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030

Peraturan WaliKota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan WaliKota Padang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Ruang

Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera Dari Batang

Arau Sampai Pantai Muaro Lasak

C. Skripsi

Charoline Koni Padaka, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Rizki Mulyawan, 2022, *Pengaturan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanggamus Lampung*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

D. Jurnal

Aghazsi, Shofie Rudhy, 2015, *Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Dan Wilayah Pesisir*, Vol.2 No.2 Lentera Hukum, 2015.

Bihuku, Salmon, 2018, *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 1, 2018

Boni, Erwin, Moh. Saleh, 2023, *Diskresi Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan*

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Hukum, Vol. 20, No. 2, 2023,

_____, 2023, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2, 2023.

Farrah Miftah , Nabillah Firdauzi , “*Bambang Arwanto, Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dalam Penerbitan Izin Usaha Di Kota Surabaya*”, Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.7, Juni 2022

Hadiyono, V, 2020, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Vol.1 No. 1, 2020.

Ias, Muhlashin, 2021, *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, jurnal Al-Qadau, Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021.

Noeraga, Muhammad Arwanda Agam, Dkk, 2020, *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air Bersih*, Jurnal UNS, Volume 2, Nomor 1, 2020

Ompusunggu, Saut Martogi, I Made Sarmita, I Gede Astra Wesnawa, 2023, *Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Pantai (Studi Kasus : Pantai Penimbangan)*. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Volume 11, No. 1, 2023.

Rohalia, Ratih Dita, Nur Laila Meilani, 2023, *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Di Kota Bukittinggi*, Vol.7, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023.

Treman, I Wayan, 2014, *Pengembangan Kawasan Pantai Berbasis Geomorfologi*, Jurdik Geografi Fis Undiksha, Issn 0216-8138, 2014.

Zainul, Arifin Muhammad dan Irsan, 2019, *Korupsi Prizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2, 2019.